

PERMASALAHAN SUMBER DAYA AIR DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAERAH IRIGASI DERAS II KABUPATEN MUSI RAWAS

YUNAN HAMDANI

Dosen Teknik Sipil Universitas Tamansiswa Palembang
Jalan Tamansiswa No. 261.Palembang kode pos 30126
E-mail : yunanhamdani@ymail.com

ABSTRAK

Daerah Irigasi Deras II merupakan irigasi teknis dan masuk ke dalam wilayah sungai Air Lakitan yang pengelolaannya merupakan kewenangan Kabupaten Musi Rawas. Daerah irigasi ini mempunyai dua bendung sebagai sumber air irigasi yaitu bendung Moyan dan Bendung Aur yang direncanakan mampu mengairi lahan sawah seluas 928 hektar. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah semula bagian hulu bendung moyan terdapat lahan tidur berupa rawa, pada saat ini rawa tersebut dimanfaatkan kembali oleh petani menjadi lahan sawah dan kolam ikan yang sumber airnya berasal dari sungai deras (hulu bendung Moyan). Dengan adanya pengambilan air ini maka berdampak pada debit air yang masuk ke intake bendung Moyan menjadi berkurang yang mengakibatkan fungsi bendung menjadi kurang maksimal. Selain itu juga pada hulu bendung memiliki permasalahan yang kompleks yang harus ditanggulangi seperti kerusakan lingkungan akibat berbagai aktifitas, penebangan hutan secara liar, konversi hutan dalam skala luas menjadi perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Permasalahan sumber daya air memang sulit untuk dihilangkan, namun dapat diminimalkan. Untuk meminimalkan masalah sumber daya air, dewasa ini dilakukan pengelolaan terpadu sumber daya air. Pengelolaan sumberdaya air terpadu (Integrated Water Resources Management/IWRM) saat ini merupakan paradigma dominan untuk pengelolaan air di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan mengetahui permasalahan sumber daya air dalam penegelolaan terpadu melalui pemetaan dinamika permasalahan sumber daya air, maka dapat dibuat konsep awal pengelolaan terpadu daerah irigasi Deras II khususnya pengelolaan terpadu pada bendung Moyan, yang hasilnya dapat dikembangkan guna pengelolaan secara menyeluruh pada daerah irigasi Deras II agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang ada dapat diminimalkan, dengan demikian dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Terpadu, Permasalahan SDA .

1. PENDAHULUAN

Kecenderungan semakin meningkatnya perkembangan kota Lubuk Linggau maupun Kabupaten Musi Rawas, baik dari aspek penduduk, ekonomi, industri rumah tangga, pariwisata dan transportasi, memicu semakin meningkatnya kebutuhan air yang diambil dari daerah aliran sungai. Hal ini semakin memicu terjadinya konflik kepentingan sumber air untuk memenuhi segala aktivitas. Pengelolaan DAS secara berkelanjutan sangatlah penting, guna mengatasi permasalahan tersebut. Artinya, pengelolaan suatu daerah aliran sungai yang mempertimbangkan berbagai aspek, terpadu dan dapat berkelanjutan terus menerus, sehingga kebutuhan air untuk segala aktivitas yang ada

dapat diatur secara tepat waktu, adil dan bertanggung jawab kelangsungannya secara berkelanjutan.

Daerah Irigasi Deras II merupakan gabungan irigasi teknis dan semi teknis dengan luas areal layanan 928 ha, daerah irigasi ini mempunyai 2 bendung sebagai sumber air irigasi yaitu bendung Moyan dan Bendung Aur dibangun Tahun 1984/1985 dan 1987/1988. Secara administrasi daerah irigasi ini meliputi wilayah Desa Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta. Pada daerah irigasi Deras II (Bendung Air Moyan) sumber air bendung Moyan berasal dari Sungai Moyan. Semula bagian hulu bendung Moyan terdapat lahan tidur berupa rawa, pada saat ini rawa tersebut dimanfaatkan kembali oleh

petani menjadi lahan sawah yang sumber airnya berasal dari sungai Deras (hulu bendung moyan). Dengan adanya pengambilan air ini maka berdampak pada debit air yang masuk ke intake Moyan menjadi berkurang, oleh sebab itu perlu dilakukan kajian mengenai besaran debit yang boleh dipakai oleh petani di hulu bendung sehingga pasokan air pada intake Moyan tidak kekurangan air. Daerah Irigasi ini pada awal pembangunannya ditujukan untuk sawah memproduksi beras. Dalam perjalanannya, sejak tahun 2000-an ada beberapa bagian pada daerah hulu bendung yang potensial, berkembang selain untuk produksi beras juga digunakan untuk budidaya ikan kolam air deras dan pembukaan perkebunan berupa kebun karet dan kelapa sawit.

Permasalahan lapangan yang timbul karena perubahan peruntukan air irigasi yang sebelumnya hanya untuk produksi beras dan berkembang untuk produksi ikan kolam air deras, telah menimbulkan konflik kepentingan di tingkat lapangan. Kondisi ini selalu disampaikan oleh petani dan petugas lapangan pada setiap kesempatan, baik di lapangan maupun di tingkat nasional. Sementara itu antara produksi beras dan ikan semua sama penting dan utama bagi daerah, karena itu tidak ada yang dapat di nomor duakan, dan kondisi jaringan irigasi pada situasi sekarang sudah tidak dapat mendukung dan terancam kelestarian dan keberlanjutannya. Berdasarkan Undang Undang no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa perlu adanya kegiatan yang tepat terhadap tata kelola pemakaian air sesuai dengan kondisi di lapangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Didalam pasal 51 ayat (1) perlu segera disosialisasikan secara benar ke berbagai kalangan khususnya di daerah bahwa tata kelola pemakaian air lebih diutamakan pada kegiatan pencegahan atau kegiatan non-fisik (non-struktur) disamping kegiatan secara fisik. Hal ini merupakan suatu prioritas pendekatan terhadap pola tata kelola pemakaian air.

Kajian konflik irigasi dan alternatif penyelesaian untuk pertanian dan perikanan di daerah irigasi Deras II (bendung air Moyan) bertujuan untuk menghimpun dan mengkaji berbagai alternatif pengelolaan air irigasi untuk kesejahteraan masyarakat, dan mengidentifikasi dan mencari formulasi pemecahan masalah dalam pemanfaatan air irigasi yang optimal, dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan jaringan irigasi dan sistem irigasi pada bendung air Moyan.

Upaya untuk memecahkan masalah konflik kepentingan antara produksi beras dan ikan kolam air deras serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan sistem irigasi tersebut diperlukan suatu kajian akademis dan masukan dari praktisi lapangan. Hasil kajian ini dapat memberikan masukan untuk saling pengertian dan bersinergi antara kebijakan pemerintah, kebutuhan petani, kebutuhan pengusaha ikan kolam air deras, dan kelestarian dan keberlanjutan sistem irigasi tersebut.

2. STUDI LITERATUR

Pengelolaan sumberdaya air terpadu / IWRM (*Integrated Water Resources Management*) adalah proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait guna memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital (Global Water Partnership-Technical Advisory Committee, 2000). Organisasi ini telah merumuskan definisi dan interpretasi IWRM, yaitu “Suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital”. IWRM didasarkan pada pemahaman bahwa sumber daya air merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari ekosistem, sumber daya alam, dan baik sosial dan ekonomi.

Prinsip pengelolaan terpadu ini dikembangkan sebagai respons terhadap pola pengelolaan SDA yang selama ini dilakukan secara terfragmentasi. Rumusan IWRM tersebut kemudian dikerucutkan lagi dalam pertemuan Global Water Partnership-South East Asia, 2004 menjadi sebagai berikut: “Co-ordinated management of resources in natural environmental (water, land, flora, fauna) based on RIVER BASIN as geographical unit, with objective of balancing man’s needs with necessity of conserving resources to ensure their sustainability”.

Konsep IWRM ini membawa paradigma baru yaitu lebih mengutamakan keterpaduan lintas sektor, keterpaduan pengelolaan, keterpaduan lingkungan dan keterpaduan antar individu. Konsep ini memilih pendekatan bottom up ketimbang top down dan mendorong pengelolaan sumber daya secara multi sektor serta multi disiplin.

Pendekatan terpadu pada pengelolaan sumber daya air akan mengedepankan kemajuan penggunaan sumber daya air, dan memupuk keberlangsungan sumber daya air dan kesetaraan sesama pemangku kepentingan. Dalam Agenda 21 UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992, dicetuskan bahwa pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh dan terpadu lintas sektor dalam kerangka kebijakan sosial ekonomi nasional adalah sungguh penting.

Karena air adalah elemen vital yang menunjang kehidupan dan pembangunan. Maka pengelolaan berkesinambungan harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dan lingkungan. IWRM adalah proses utama dimana berbagai faktor terhubung, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dari berbagai level dalam kerangka koordinasi dan perencanaan lintas sektor dari berbagai kalangan terkait.

Prinsip utama IWRM, sesuai dengan prinsip Dublin 1991 adalah pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air harus berdasarkan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pengguna, perencana dan pembuat kebijakan di semua tingkat.

Konsep IWRM atau pengelolaan sumber daya air terpadu kemudian diadopsi pemerintah Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Disebutkan dalam pasal 3 UU SDA bahwa "Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup...". Lebih lanjut dalam pasal 85 ayat 1 UU SDA menyebutkan, "Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air." Kemudian pasal 85 ayat 2 menyebutkan, "Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air."

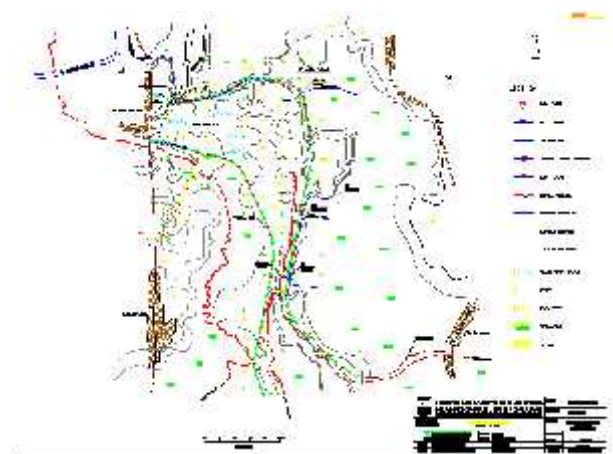
Sesuai amanat undang-undang itu, maka pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu dilakukan untuk membenahi permasalahan pada Daerah Irigasi Deras II. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penanganan terpadu ini cukup banyak terutama terkait kepentingan antar sektor yang masih menonjol.

3. METODOLOGI

Penelitian ini telah dilaksanakan tahun 2017 dengan pendekatan lokasi Daerah Irigasi Deras II khusus pada Bendung Air Moyan yang mengairi lahan irigasi seluas 386 ha. Secara administratif daerah irigasi ini meliputi wilayah Desa Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survey dan pengisian kuisioner dan sampel diambil berdasarkan letak daerah layanan terhadap bangunan sadap utama atau bendung, yaitu dibagi tiga : bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir. Kemudian untuk populasi yang tidak merata sebarannya seperti letak sawah yang berada di daerah hulu bendung dan letak kolam, sampel diambil berdasarkan posisi kolam dan luasan kolam serta jumlah kolam yang berada di hulu bendung, yang berguna untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan konflik pemanfaatan air irigasi.

Selanjutnya untuk mendapatkan kesamaan pemahaman tentang fakta yang ditemukan, dilakukan diskusi dengan cara duduk bersama untuk mendapatkan kesamaan persepsi, seperti yang diamanatkan dalam pasal 85 ayat 2 UU SDA. Adapun pihak yang telah diminta masukan melalui wawancara berasal dari pihak pemerintah, pengusaha ikan, petani, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Musi Rawas. Dalam mencari penyelesaian digunakan pendekatan sehingga antara petani dan pemilik kolam sama-sama diuntungkan dan penyelesaian masalah yang diharapkan dapat dipakai secara permanen.



Gambar 1. Lokasi Bendung Air Moyan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah irigasi Deras II (Bendung Air Moyan) dibangun pada tahun 1985 dengan klasifikasi jaringan irigasi semi teknis yang pengelolaannya masuk dalam kewenangan Kabupaten Musi Rawas. Sumber air berasal dari sungai Moyan dan dapat melayani irigasi seluas 386 ha dengan bangunan pengambilan tipe bendungan urugan tanah dan koordinat $x = 271.335$ dan $y = 9.659.404$ berada di desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta. Hasil penelitian terhadap potensi ketersediaan air di Bendung Air Moyan, didapatkan debit air telah jauh berkurang sehingga tidak mampu melewati peil mercu bendung seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini



(a)



(b)



(c)

Gambar 2. Bendung Air Moyan (a) Kondisi air pada peil mercu bendung. (b) Kondisi arah hilir bendung.

(c) kondisi di hulu bendung.

Pada saat ini telah terjadi fluktuasi debit yang besar antara musim hujan dan musim kemarau, sehingga menyebabkan kebutuhan air irigasi menjadi terganggu dan dari hasil pendalaman terhadap sumber permasalahan konflik irigasi dilapangan di lokasi Bendung Air Moyan didapatkan permasalahan dimana petani yang terkumpul dalam Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap kepastian mendapatkan air dari pemerintah dikarenakan adanya perbedaan fluktuasi debit air pada bangunan pengambilan dan pola pembagian air dan petugas pembagi air dilapangan antara petani dengan petani, antara petani dengan kolam air deras, dan dengan pemakai air yang membuka kembali lahan sawah di arah hulu bendung tidak ada, sehingga terjadi rebutan antar pihak dan pengaturan pembagian air irigasi belum diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku sedangkan peraturan perundangan telah berubah dengan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana Pemerintah Daerah sangat lambat dalam implementasi perubahan peraturan perundangan di lapangan. Karena itu pelaksanaan kewenangan pengelolaan irigasi pada lokasi tersebut menjadi seolah-olah tidak ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab, atau saling lempar tanggung jawab sehingga terjadi semacam pembiaran pemberian izin untuk pengambilan air sehingga terjadi pemakaian air yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti pembukaan lahan sawah dan kolam air di sebelah hulu bendung yang mengakibatkan debit air menjadi jauh berkurang terutama pada musim kemarau. Seperti diketahui pemakaian air untuk kolam cukup boros sehingga mengakibatkan berkurangnya debit sungai Moyan sebagai sumber air pada bendung Air Moyan dan berakibat terganggunya pasokan air di peil mercu bendung Moyan.

Sebagian petani yang membuka lahan di hulu sungai Moyan memanfaatkan sawahnya untuk pendederan (pembesaran anak ikan) sehingga mengganggu jadwal tanam serta petani yang lain tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan tidak ada pola tanam, jadwal tanam dan jadwal penebaran benih ikan, sehingga mengakibatkan budidaya tanaman padi sudah

tidak dapat dilakukan dua kali setahun, dan antar petani tidak mematuhi kesepakatan diantara mereka berupa bertanam tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lebih-lebih hal tersebut terjadi pada musim kemarau sehingga produk pertanian mereka mengalami penurunan yang drastis, bahkan banyak para petani yang merubah peruntukan lahannya menjadi lahan perkebunan dan berakibat sebagian lahan sawah telah beralih fungsi menjadi kebun karet dan sawit.

Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya adalah terjadi pendangkalan alur sungai Moyan yang diakibatkan oleh erosi dan sedimentasi di hulu dan mengakibatkan debit air menjadi berkurang dan banyaknya eceng gondok di permukaan air yang berpotensi memperlambat aliran air.

Berdasarkan sumber dari masyarakat elevasi muka air biasanya mencapai 40 cm diatas mercu bendung dan saluran terisi air sampai ke ujung hilir saluran, namun sekarang saluran mengalami kekeringan selama 4 tahun terakhir. Di sebelah hulu mercu bendung terdapat sungai yang mempunyai lebar sungai 30-50 m, kedalaman 5 meter dan mempunyai debit air yang cukup kecil akibat pengaruh erosi dan sedimentasi alur sungai.

Dampak dari kondisi dan permasalahan diatas adalah saluran irigasi dan bangunan irigasi menjadi tidak terawat dan sebagian menjadi rusak, pintu air banyak tidak berfungsi dan pembagian air hanya berdasarkan perkiraan dan jumlah air yang mengalir tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi dan mengakibatkan kekurangan air pada sawah-sawah bagian hilir daerah irigasi, dan bagian tengah terutama pada musim kemarau, dan banyak terjadi kebocoran di saluran primer, sekunder, dan tersier yang disebabkan saluran rusak dan petani melakukan pelobangan saluran untuk pencurian air.



Gambar 3. Kondisi saluran yang rusak

Penyelesaian masalah konflik air irigasi di lokasi Bendung Air Moyan tidak dapat dilakukan hanya sebagian saja, tetapi harus menyeluruh dan terpadu oleh para pihak seperti konsep IWRM. Untuk itu konflik yang ada sekarang ini harus dikelola dengan bijaksana, dimana semua pihak merasa diuntungkan karena diperlukan penyelesaian yang permanen dan oleh karena itu perlu kerjasama yang baik. Rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut banyak sekali yang disampaikan, namun jika ditarik kesimpulan ada beberapa pokok-pokok penting antara lain :

- Membuat peraturan perundangan irigasi yang mengatur kepentingan para pihak di dalam daerah irigasi, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang baru serta menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu dengan memberikan sanksi kepada siapapun.
- Semua pemilik kolam ikan harus mempunyai izin dan untuk kolam ikan yang airnya tidak kembali lagi kesaluran semula agar konstruksinya dirubah sehingga air bisa kembali lagi kesaluran semula serta mengendalikan pemakaian airnya.
- Membatasi jumlah kolam ikan dan pemakaian volume airnya diatur dengan memasang alat ukur. dengan pembatasan waktu izin dan peninjauan izin operasi setiap beberapa waktu sesuai kebutuhan.
- Merehabilitasi jaringan dan bangunan irigasi yang sudah rusak agar dapat berfungsi lagi dengan baik.
- Memfungsikan tugas dan kewajiban Komisi Irigasi ditingkat kabupaten untuk menetapkan pola tanam polatanam, jadwal tanam dan jadwal irigasi sesuai kebutuhan lapangan.
- Mensosialisasikan pertanian yang hemat air memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti P3A ditingkat tersier, sekunder dan primer.
- Menegakkan peraturan yang telah ada dengan tegas dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta memberikan sanksi kepada para pihak yang melanggar.
- Perlu adanya tindakan normalisasi sungai Moyan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di hulu bendung

Pertemuan juga dilanjutkan dengan peninjauan dilapangan terutama pada lokasi-

lokasi yang dianggap kritis karena adanya pengrusakan fasilitas irigasi yang ada.

Untuk permasalahan konisi debit yang kecil sebenarnya hal ini bisa diantisipasi dengan memperdalam areal tampungan pada sungai eksisting sehingga dapat menambah kapasitas tampungan sehingga bisa mengalirkan debit air sesuai dengan yang direncanakan. Pada bulan Desember – Juni adalah waktu dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga bisa memberikan supply air yang cukup besar pada kolam tampungan. Sementara pada bulan Juli – Oktober, bendung dapat berfungsi dengan adanya kolam tampungan sehingga mencukupi kebutuhan.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi di area sekitar kawasan pengembangan Daerah Irigasi Deras II, untuk menjaga kesinambungan dari pemanfaatan air permukaan dan air tanah.

5. KESIMPULAN

- Perubahan atau alih fungsi lahan dari sawah menjadi kolam telah merubah keseimbangan penggunaan air, sebagai dampaknya luas daerah layanan ada cenderung menurun. Karena itu pola pengelolaan air yang lama dengan instrumennya tidak mampu mengimbangi perkembangan yang ada dilapangan.
- Pengelolaan konflik penggunaan air irigasi untuk pertanian dan perikanan di lokasi Bendung Air Moyan diharapkan dapat didekati dengan sistem kolaborasi.
- Penyelesaian masalah konflik air irigasi di lokasi Bendung Air Moyan tidak dapat dilakukan hanya sebagian saja, tetapi harus menyeluruh dan terpadu oleh para pihak seperti konsep pengelolaan terpadu (IWRM).
- Perlu dilakukan tindakan normalisasi sungai Moyan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di hulu bendung.
- Upaya lain yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi di area sekitar kawasan pengembangan Daerah Irigasi Deras II, untuk menjaga kesinambungan dari pemanfaatan air permukaan dan air tanah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dispertan Musi Rawas dan Faperta Universitas Sriwijaya. 2005. *Studi Pengelolaan Konflik Penggunaan Air Irigasi untuk Pertanian dan Perikanan Di Daerah Irigasi Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas*. Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Lubuk Linggau.
2. Robert J. Kodoatie & Roestam Sjarief, 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Penerbit Andi Yogyakarta.
3. Global Water Partnership, Technical Assistance Committee, 2000, *Integrated Water Resources Management, TAC Background papers No. 4*, <http://www.gwpforum.org/gwp/library/Tacno4.pdf>
4. United Nations Water Virtual Learning Center (WVLC), *Introduction to IWRM*, <http://wvlc.uwaterloo.ca/>